



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
2025



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LEMBAR PENGESAHAN



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Disetujui oleh:

Penanggung Jawab,
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari



Asep Saepulloh, S.P., M.Si

Kendari, 18 April 2025

Disusun oleh:

Ketua Tim,
Kepala Subbagian Umum

Rasdiana Alimuddin, S.Pi

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja PPS Kendari Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi PPS Kendari kepada publik dengan mengacu kepada ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pada tahun 2020 merupakan pencapaian yang dijadikan dasar (*base line*) untuk menetapkan target pada tahun - tahun berikutnya yang kemungkinan besar akan berdampak pada reuiu beberapa dokumen perencanaan di tahun 2025.

Melalui laporan ini diharapkan agar pembaca dapat memahami upaya - upaya yang telah dilakukan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja bersama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Diharapkan pula agar diperoleh masukan dan saran yang positif guna perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun berikutnya.

Kendari, 18 April 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
EXCUTIVE SUMMARY.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	10
1.1 LATAR BELAKANG	10
1.2 TUGAS DAN FUNGSI	11
1.3 SDM PELABUHAN	13
1.4 PERMASALAHAN	14
1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN	18
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029	20
2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN.....	8
2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025.....	10
2.4 RENCANA AKSI.....	12
BAB III.....	15
AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	15
3.2 REALISASI ANGGARAN	60
BAB IV.....	62
PENUTUP	62
4.1. KESIMPULAN.....	62
4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA	62
4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT	63
LAMPIRAN	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin	14
Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11
Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025	12
Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	13
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2025	15
Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBP Per Akun Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja "Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	22
Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	25
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	27
Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	29
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	31
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025.....	33
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan I Tahun 2025	36
Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	42
Tabel 16. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP	44
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	52

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025	53
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025.....	58
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja.	60
Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025	13
Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I.....	21
Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru	23
Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBPN Non SDA	21
Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap.....	24
Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I dengan predikat SANGAT BAIK	28
Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran.....	30
Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	32
Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan	35
Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah	38
Gambar 11. Kegiatan Bimbingan Teknis SKPI dan SKN di Kab. Wakatobi	39
Gambar 12. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI	41
Gambar 13. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan I.....	43
Gambar 14. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	45
Gambar 15. Perjanjian Kinerja Tahun Perubahan I Tahun 2025.....	45
Gambar 16. Dokumen rencana aksi, manual IKU, dan rincian indikator kinerja	46
Gambar 17. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN	48
Gambar 18. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN	49
Gambar 19. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN	49
Gambar 20. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN.....	49
Gambar 21. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN	50
Gambar 22. Pemberitahuan terkait IP ASN melalui <i>Whatsapp Group</i> PPS Kendari	51
Gambar 23. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengelolaan BMN	54
Gambar 24. Publikasi Nilai SKM Triwulan I pada Sosial Media.....	60

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian PNBPNon SDA Triwulan I.....	19
Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBPNon SDA Triwulan I Tahun 2020 - 2025	20
Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi Triwulan I PPS Kendari.....	22
Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan I PPS Kendari.....	23
Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi	23
Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan	27
Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2020-2025 ..	28
Grafik 8. Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan Triwulan I	34
Grafik 9. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan.....	34
Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan	34
Grafik 11. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan I	36
Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan I	37
Grafik 13. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I	42
Grafik 14. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I ...	42
Grafik 15. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I.....	59
Grafik 16. Perbandingan Capaian SKM Triwulan I Tahun 2024 – 2025	59

EXECUTIVE SUMMARY

Birokrasi merupakan alat utama dalam penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan karena berfungsi untuk menerjemahkan sebagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan publik serta untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut secara operasional, terutama untuk memberikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi menjadi faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda negara dan pemerintahan, dalam kerangka upaya merealisasi sebuah tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

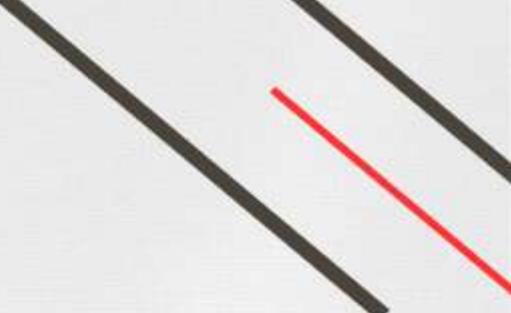
Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti ditargetkan dalam Renstra 2025-2029, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap khususnya Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, namun juga komitmen, keterlibatan seluruh pihak terkait dalam mewujudkan akuntabilitasnya. Secara kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari mendapatkan total Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 102.72 sebagaimana *dashboard* di bawah ini:



Dari 5 sasaran Kegiatan ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja, sebanyak 3 (tiga) sasaran yang terukur dinyatakan Istimewa, 1 (Satu) sasaran dinyatakan Baik, dan 1 (Satu) sasaran lainnya dinyatakan Cukup.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025 telah dikeluarkan anggaran sebesar **Rp4.277.912.972** atau **8,35%** dari Pagu sebesar **Rp51.259.064.000**. Bagaimanapun juga sesuai dengan intruksi Presiden RI bahwa penyerapan Anggaran setiap instansi pemerintah harus lebih optimal, jika perlu harus mendekati angka 98 %, hal itu artinya bahwa anggaran yang mampu diserap pada akhirnya akan bergulir kepada masyarakat sehingga perekonomian secara nasional berkembang dengan

baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Namun demikian, efisien penggunaan anggaran tetap harus dikedepankan, khususnya efisiensi yang berasal dari pengadaan barang/jasa, dan penghematan lainnya yang dianggap perlu dengan tidak mengurangi efektifitas organisasi dalam melaksanakan pencapaian sasaran strategis masing – masing.



BAB I

PENDAHULUAN

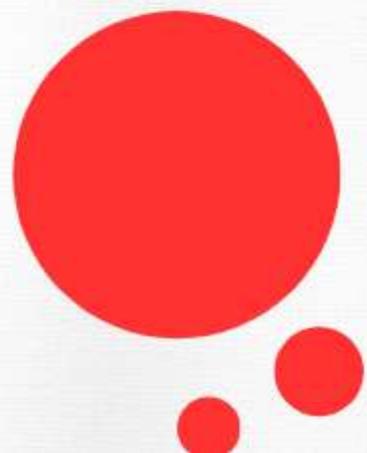
1.1 LATAR BELAKANG

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

1.3 SDM PELABUHAN

1.4 PERMASALAHAN

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Guna mencapai tujuan pembangunan perikanan tangkap, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap, yang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan bertanggung jawab (*good governance*) diperlukan pertanggung jawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi : pertanggung jawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dihasilkan, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai, (2) sebagai upaya

perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggung jawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) bisa diwujudkan.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *LogBook*;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;

12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;
13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelabuhan perikanan tersebut, maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, sebagai berikut:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, maka struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari



Gambar 1. Struktur Organisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

1.3 SDM PELABUHAN

Berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian, disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan, serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

Sedangkan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Adapun komposisi pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Samudera Kendari berjumlah 120 orang yang terdiri 76 orang ASN, 19 orang PPNPN, dan 25 orang Jasa Lainnya Perorangan yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Seluruh SDM di pelabuhan perikanan ini merupakan aset untuk mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Komposisi ASN PPS Kendari Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan						Jumlah	
		S3	S2	S1	DIV	DIII	SLTA		SLTP
1	Laki-Laki		8	18	17	4	12		59
2	Perempuan		2	9	1		5		17
	Jumlah		10	26	24	4	16		76

1.4 PERMASALAHAN

Secara umum Perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks karena terkait dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Ada berbagai isu yang muncul saat ini terkait dengan pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian SDI dan lingkungan dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan. Praktek-praktek IUU Fishing yang terjadi baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing yang menyebabkan kerugian dari berbagai aspek.

Kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah, untuk itu kapasitas dan kapabilitas petugas pengawasan harus terus ditingkatkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap di Indonesia. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

- 1) Kapasitas Nelayan; Rendahnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan produktif dan efisien serta yang ramah lingkungan, dan rendahnya pengetahuan nelayan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan, karena itu PPS Kendari terus melakukan berbagai upaya dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran pelaku utama terutama nelayan.
- 2) Kesejahteraan Nelayan; Belum terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga nelayan serta rendahnya kemampuan nelayan dalam mengakses sumber

permodalan dan mengelola keuangan dalam menghadapi kerentanan usaha penangkapan ikan terhadap perubahan lingkungan dan cuaca.

- 3) Mindset Masyarakat Perikanan Tangkap; Usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan
- 4) Sarana Prasarana Usaha Penangkapan Ikan; Belum optimalnya infrastruktur pelabuhan perikanan, konektivitas sistem informasi yang kurang, struktur armada kapal perikanan yang didominasi kapal kecil dengan jangkauan yang terbatas, minimnya armada kapal perikanan yang memenuhi laik tangkap dan laik simpan, kurangnya pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang *reliable*, minimnya penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien
- 5) Konektivitas Analisis dan Pemantauan Pemanfaatan Usaha; Belum jelasnya mekanisme pendataan nelayan kecil, serta belum optimalnya integrasi perizinan usaha antara pusat-daerah, dan kurangnya intensifikasi penggunaan sistem IT.

Sedangkan tantangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, diantaranya adalah (1) Optimalisasi kelembagaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), (2) Harmonisasi tata ruang laut dan darat untuk penguatan penyelarasan antara RTRW dengan RZWP3K dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional/Tertentu (RZ KSN/KSNT), (3) Masih terjadinya praktek IUU *fishing* dan *destructive fishing*, dan (4) Sinergi stakeholders dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan. Dalam kondisi ini nelayan terkendala dengan pemenuhan persyaratan prosedural perbankan yang dianggap cukup rumit dan panjang.

Kondisi kesejahteraan pada nelayan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dengan pendapatan yang diperolehnya masih sangat terbatas.

Permasalahan yang dihadapi dalam menghadapi MEA 2015 utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaku usaha UMK untuk meningkatkan daya saing melalui sinergi lintas sektor termasuk dalam mengakses pembiayaan, perlindungan terhadap pasar domestik dan sertifikasi produk.

Dalam menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun ke depan 2025-2029, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melakukan analisis dalam memetakan lingkungan strategis organisasi dengan teknik analisis kekuatan (*strength*) - kelemahan (*weakness*) - peluang (*opportunities*) - hambatan (*threats*) atau SWOT Analisis sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

• **Faktor Internal**

a. Kekuatan (*Strength*)

Dengan memperhatikan *stakeholders* dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Lokasi PPS Kendari yang langsung menghadap Laut Banda adalah merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-714 dan 715) dengan beberapa keanekaragaman sumberdaya ikan dan mempunyai nilai ekonomis tinggi yang masih potensial untuk dikembangkan pengelolaannya.
- 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan master plan.
- 3) Tersedianya data statistik dan Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara bertanggungjawab.
- 4) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pelayanan terpadu di kawasan PPS Kendari.
- 5) Pelayanan Publik berstandar ISO 9001 : 2008

b. Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- 1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang masih kurang memadai.
- 2) Penurunan kapasitas fasilitas pokok pelabuhan terutama pendangkalan kolam pelabuhan
- 3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan.
- 4) Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran serta keterampilan nelayan dalam penanganan ikan hasil tangkapan

• Faktor Eksternal

a. Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan perikanan tangkap sesuai visi dan misi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

- 1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kota Kendari.
- 2) Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.
- 4) Aksesibilitas distribusi hasil perikanan.

b. Ancaman/Tantangan

Adapun beberapa ancaman/tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya komitmen instansi terkait dalam penerapan regulasi perikanan.
- 2) Maraknya pembangunan industri diluar Kawasan sehingga mengancam eksistensi industri dalam kawasan.
- 3) Pendaratan ikan belum mampu memenuhi kapasitas pengolahan ikan yang ada dalam Kawasan.
- 4) Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.

- 5) Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- 6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi suatu unit organisasi yang transparan, dan sebagai alat kendali serta pemacu peningkatan kinerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu pada tahun 2025. Adapun kaitan dari sistematika penyajian Laporan Kinerja (Lkj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 sebagai berikut

1. Ikhtisar Eksekutif / *Executif Summary*

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini disajikan informasi umum tentang Laporan Kinerja yang menjadi tanggungjawab sebuah instansi pemerintah, penjelasan secara umum suatu organisasi serta bagan organisasi dan informasi tentang alur capaian kinerja yang meliputi dari perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja dan capaian kinerja selama waktu tertentu (waktu pelaporan).

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK) pada periode tahun yang tertentu (tahun pelaporan).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

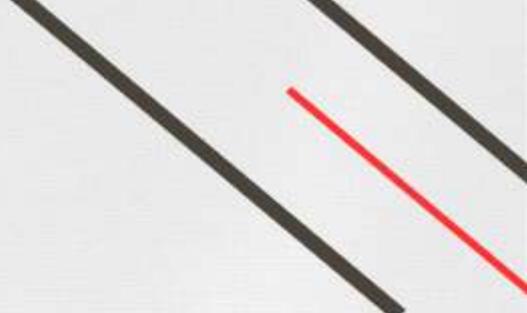
Pada bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas - tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis serta strategi pemecahan masalah.

6. Lampiran

Isi dari pada lampiran merupakan kumpulan dari Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja yang telah ditanda tangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan samudera Kendari dan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.



BAB II

PERENCANAAN

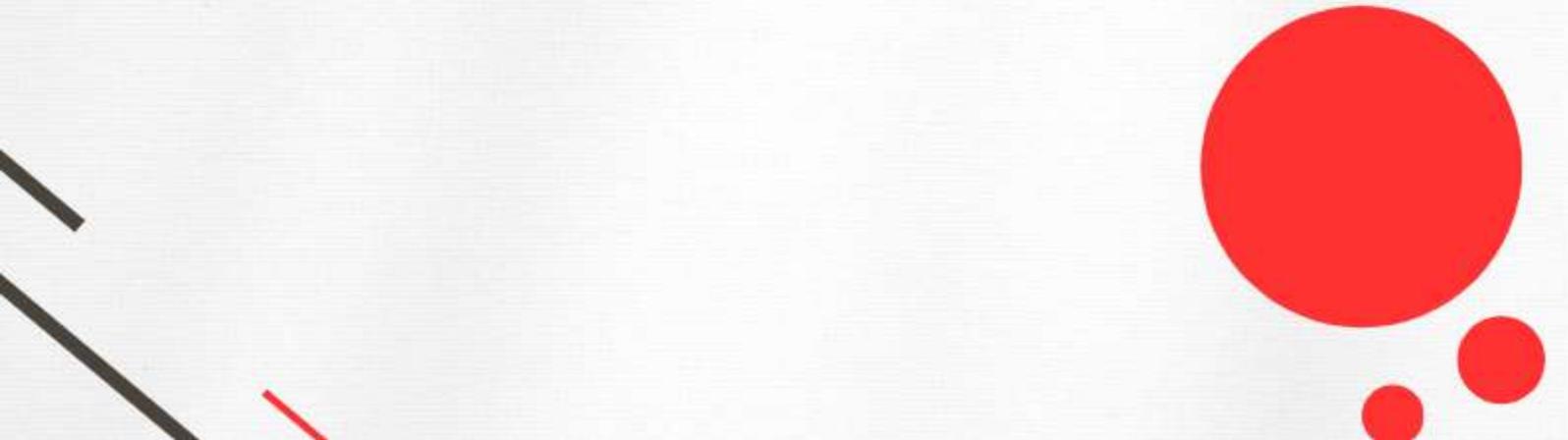
KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN
2025 - 2029

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

2.4 RENCANA AKSI



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan integrasi antara kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan visi, misi, dan program Presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Pembangunan jangka panjang tahun 2025-20245 merupakan tahapan pembangunan yang berkesinambungan dimana tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama penguatan transformasi. Untuk itu di dalam 2025-2029 diuraikan berbagai upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana dan Kesenambungan Pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025-2029 merupakan penggabungan antara Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I. RPJMN tahun 2025-2029 menetapkan delapan Prioritas Nasional sebagai arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung Asta Cita. Prioritas Nasional tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan arah kebijakan dan pelaksanaan strategi Rencana Strategis KKP 2025-2029. KKP berkontribusi dalam pencapaian indikator sasaran kegiatan prioritas dalam RPJMN 2025-2029 yang dijabarkan sebagai berikut:

Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I



1 Transformasi Sosial

- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
- Peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif



2 Transformasi Ekonomi

- Melanjutkan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan
- Peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
- Penerapan ekonomi hijau, termasuk pelaksanaan transisi energi tahap pertama
- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia
- Pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa



3 Transformasi Tata Kelola

- Perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi
- Penyempurnaan fondasi penataan regulasi
- Pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi
- Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
- Kebijakan pembangunan berbasis bukti
- Penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
- Peningkatan pelayanan public berbasis teknologi informasi
- Penguatan kapasitas masyarakat sipil



4 Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepimpinan Indonesia

- Pembaharuan substansi hukum
- Pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila
- Transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional
- Lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai
- Menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif
- Penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan
- Mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi
- Pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat, dan mandiri



5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- Optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat
- Peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana
- Penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup
- Pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan
- Penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan penurunan emisi GRK



6 Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana

- Peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi
- Pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa)
- Percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital
- Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 8 (enam) klaster ekonomi ibu Kota Nusantara (iKN)
- Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan *micro grid*)



7 Kestinambungan Pembangunan

- Reformasi tata kelola fiskal
- Mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah

Gambar 2. Fokus Arah Kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 Tahap I

Sejalan dengan RPJMN 2025-2029, arah kebijakan dan pembangunan kelautan dan perikanan didasari oleh perubahan *mindset* bahwa pembangunan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru harus dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya dengan melindungi laut dan sumber dayanya, mengurangi tekanan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan serta menjaga kelestarian ekosistem perairan sebagai rumah bagi kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki. Terdapat empat aspek yang melandasi kerangka pikir pembangunan ekonomi biru, yaitu:

1. Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Main System Pembangunan Nasional

Untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu sektor yang didorong untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional maka sektor kelautan dan perikanan harus menjadi *leading sector* yang harus mendapatkan sokongan oleh sektor lainnya dalam setiap konteks pembangunan nasional.

2. Ekologi Sebagai Panglima

Pembangunan kelautan dan perikanan memprioritaskan pada perlindungan laut untuk memberikan ruang hidup bagi sumber daya hayati yang ada di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Laut merupakan episentrum serapan karbon dunia yang berkontribusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim dan gas rumah kaca. Potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki harus dioptimalkan secara berkelanjutan sehingga menjadi *champion* di pasar global.

3. Market Driven Oriented

Pembangunan kelautan dan perikanan harus dapat mudah beradaptasi terhadap tuntutan pasar domestik dan global sehingga daya saing kompetitif dan komparatif harus terus ditingkatkan.

4. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, mengakses informasi secara akurat dan *real-time*, serta mendorong pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan antara lain: pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi satelit, serta teknologi lainnya yang dapat meningkatkan produktivitas.

Selain itu, pembangunan kelautan dan perikanan memperhatikan 4 prinsip pembangunan yaitu; 1) **Tematik**, mempertimbangkan keunggulan komparatif suatu wilayah; 2) **Holistik**, mengintegrasikan hulu-hilir industri kelautan dan perikanan; 3) **Integratif**, sinergi dan integrasi antara program dan anggaran lintas sektor; dan 4) **Spasial**, pengembangan kawasan berbasis daya dukung secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan 3 aspek keberlanjutan yaitu; sosial, lingkungan, dan ekonomi.



Gambar 3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Biru

Maka, arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029 adalah: 1) Memperluas Kawasan Konservasi Laut; 2) Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota; 3) Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan; 4) Pengawasan dan Pengendalian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 5) Pembersihan Sampah Plastik di Laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih baik, pemerintah telah mengidentifikasi lima arah kebijakan pengarusutamaan yang bersifat inovatif dan adaptif. Kelima arah kebijakan ini saling terkait dan bertujuan untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang lebih sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan serta menjadi landasan pembangunan kelautan dan perikanan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Tahun 2025 – 2029, tujuan dari Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Dalam mencapai tujuan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan beberapa sasaran strategis yang kemudian dilakukan penjenjangan hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam hal ini adalah Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun sasaran strategis yang telah ditetapkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp Juta)
2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat, dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja:
 - a. Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisis/dan atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - b. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - c. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - d. Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - e. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai).
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal);
 - b. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai).

5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan (nilai);
 - b. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - c. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - d. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (indeks);
 - e. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - f. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen);
 - g. Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - h. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai);
 - i. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks);

2.3 INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Untuk mengukur realisasi dan rencana strategis, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari menetapkan indikator kinerja dan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai sehingga lebih terarah dan terkendali. Target ini dituangkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini ditetapkan untuk setiap indikator kinerja baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan yang merupakan penjabaran dari program-program yang telah disusun sebelumnya. Adapun indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Indikator Kinerja Tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04	Tim Kerja Pelayanan Usaha
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkatkan	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000	Tim Kerja Operasional
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	Tim Kerja Operasional
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Kesyahbandaran
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10	Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333	Tim Kerja Kesyahbandaran
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26	Tim Kerja Kesyahbandaran
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5	Tim Kerja Dukungan Manajerial

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PJ	
	Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87	Tim Kerja Dukungan Manajerial
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76	Tim Kerja Dukungan Manajerial

Dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2025 Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai wujud Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan anggaran sebesar Rp. **51.259.064.000** Pagu tersebut dilaksanakan untuk melaksanakan 3 (tiga) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Komposisi Anggaran Berdasarkan Jenis Kegiatan Tahun 2025

No	KEGIATAN	PAGU
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan;	32.263.573.000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan;	34.010.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.	18.961.481.000
TOTAL		51.259.064.000

2.4 RENCANA AKSI

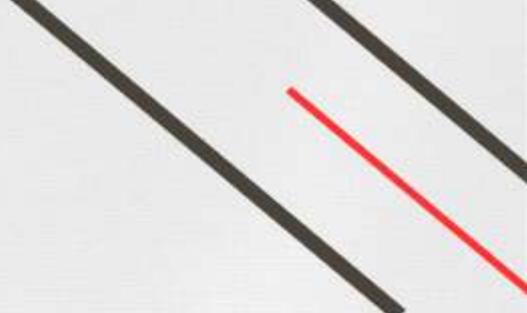
Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut dari target – target yang telah disusun dan ditetapkan pada dokumen. Dokumen rencana aksi digunakan

sebagai alat monitor secara berkala (triwulanan) terhadap pencapaian indikator output dan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sehingga dapat dilakukan upaya – upaya tindak lanjut guna mengeliminir permasalahan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU pada perspektif internal proses dan learning and growth sebagaimana pada Tabel berikut ini:

Tabel 4. Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

Rencana Aksi Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2025

Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Unit/PP	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Saluran Target Kegiatan	Target																		
							Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Oktr	Nov	Des							
1. Mula 7000 ton/ton Perikanan Tangkap (Perikanan Tangkap) dan Perikanan Budidaya (Perikanan Budidaya)	1. Peningkatan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dit. Perikanan Tangkap	Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap	20.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Penelitian dan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan budidaya	10.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
			Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Operasional dan pemeliharaan kapal perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Perikanan Tangkap dan Budidaya)	2. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dit. Perikanan Tangkap	Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
			Operasional dan pemeliharaan kapal perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
			Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
	3. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Perikanan Tangkap dan Budidaya)	3. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dit. Perikanan Tangkap	Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
				Operasional dan pemeliharaan kapal perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
				Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		4. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Perikanan Tangkap dan Budidaya)	4. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dit. Perikanan Tangkap	Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
					Operasional dan pemeliharaan kapal perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
					Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
			5. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (Perikanan Tangkap dan Budidaya)	5. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Dit. Perikanan Tangkap	Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
						Operasional dan pemeliharaan kapal perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
						Operasional dan pemeliharaan alat perikanan tangkap dan budidaya	11.000.000	11	Dibekukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

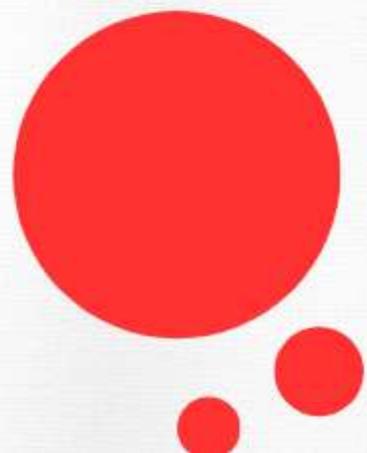


BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 REALISASI ANGGARAN



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap tahun 2025 diukur melalui 18 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terbagi ke dalam 5 (lima) Sasaran Strategis yakni sebagai berikut:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
2. Produktivitas Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 1 indikator;
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab, dengan indikator kinerja sebanyak 5 indikator;
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 2 indikator;
5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dengan indikator kinerja sebanyak 8 indikator.

Pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada triwulan I tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I			
				TARGET	REALISASI	%	
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	01	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp.Juta)	7.241,04	1.600	1.671,49	104,47
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkatkan	02.	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan	16.000	4.500	3.210,93	71,35

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	TRIWULAN I		
			TARGET	REALISASI	%
	Samudera Kendari (Ton)				
3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	04. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87	87	93,25	107,18
4. Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	08. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2330	2293	2549	111,16
7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	11. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85	85	100	117,65
	14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	76	76	100	120
	18. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	88,50	88,50	93,10	105,20

Berdasarkan tabel di atas, nilai kinerja organisasi (NKO) PPS Kendari pada triwulan I adalah 102,72, dengan 4 (enam) IKU & IKM yang bernilai Istimewa (nilai di atas 110), 3 (Tiga) IKU & IKM yang bernilai Baik (nilai 90- <110), dan 1 (Satu) IKU yang bernilai Cukup (nilai 70- <90). Pembahasan masing-masing indikator akan dicantumkan pada sub bab berikut sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Permen KP Nomor 35/PERMEN-KP/2023 untuk laporan kinerja interim, sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja triwulan berjalan;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja triwulan berjalan dengan triwulan tahun sebelumnya atau triwulan sebelumnya (jika ada);
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan triwulan berjalan dengan target tahunan;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; dan
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

3.2. EVALUASI DAN ANALISA PENCAPAIAN KINERJA

Adapun hasil evaluasi dan analisa pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebagai berikut:

3.2.1. Sasaran Kegiatan 1 – Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian sasaran kegiatan ini diukur melalui 1 (satu) Indikator yakni; Nilai PNPB non SDA Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)

Indikator Kinerja (IK-1) : Penerimaan PNPB non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Nilai PNPB non SDA dari sektor Perikanan Tangkap adalah seluruh penerimaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berasal dari penerimaan operasional Pelabuhan. Peningkatan PNPB dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari arah operasional pelabuhan perikanan samudera kendari. PNPB yang dikelola oleh PPS Kendari berupa PNPB yang berasal dari Pendapatan jasa pelabuhan, Penggunaan sarana dan prasarana, Jasa lainnya.

Target nilai PNBP non SDA pada tahun 2025 adalah sebesar Rp7.241.040.000 dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun realisasi target PNPB Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja "Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 1					Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 1					Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
2.27	1.3	1.9	2.165,84	2.153,71	7.241,04	1.600	1.671,49	104,47	23,08

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

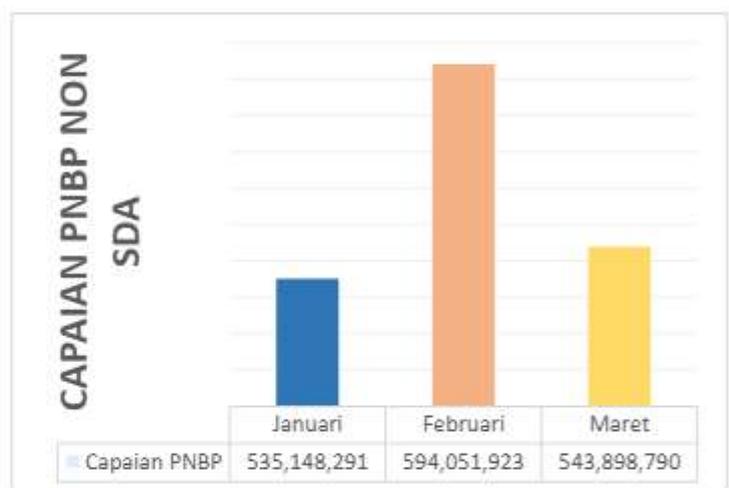
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target sebesar Rp1.671.495.209 atau 104,47% dari target. Adapun laporan target & realisasi PNBP per akun yang bersumber dari data TPNBP – SPAN – dan SIMPONI adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Laporan Target & Realisasi PNBP Per Akun Triwulan I Tahun 2025

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)
1.	425122 – Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.251.859,00	1.251.859,00
2.	425131 – Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	16.456.000,00	250.667.644,00	246.265.523,00
3.	425151 – Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	2.356.277.000,00	159.855.116,00	159.855.116,00

No	Akun	Target Sumber Data TPNBP (Rp)	Realisasi – Sumber Data SPAN (Rp)	Realisasi – Sumber Data Simponi (Rp)
4.	425621 – Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	4.868.307.000,00	1.257.862.422,00	1.259.466.217,00
5.	425911 – Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	0,00	1.858.168,00	1.858.168,00
TOTAL		7.241.040.000	1.671.495.209	1.668.696.883,00

Apabila dilihat capaian PNBPN per bulannya, capaian tertinggi didapatkan pada bulan Februari yaitu sebesar Rp594.051.923 yang diperoleh sebagian besar dari pengadaan air yaitu senilai Rp157.214.058. Selain itu terdapat pendapatan yang fluktuatif yaitu pada jasa tanah yang dipakai dalam kawasan/bangunan.



Grafik 1. Capaian PNBPN Non SDA Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, realisasi di tahun ini terdapat penurunan penerimaan sekitar Rp482.000.000 atau sebesar 22,38%. Adapun perbedaan yang cukup signifikan dengan triwulan lalu di tahun 2024 adalah adanya pendapatan yang didapat dari akun 425289 - Pendapatan pengujian, sertifikasi, kalibrasi, dan standarisasi lainnya serta



Grafik 2. Perbandingan Capaian IKU Penerimaan PNBP Triwulan I Tahun 2020 - 2025

dari akun 425421 – Pendapatan layanan Pendidikan dan atau pelatihan, dan terdapat penurunan untuk pendapatan jasa Pelabuhan perikanan.

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2024, capaian kinerja untuk IKU ini sudah mencapai 23,08%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Penerimaan PNBP non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.671.495.209 atau 104,47 % telah melampaui dari target sebesar Rp1.600.000.000. Hal ini dipengaruhi oleh komitmen para petugas pelayanan jasa di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Selain itu, tercapainya penerimaan PNBP didukung oleh beberapa faktor, antara lain: meningkatnya kegiatan operasional yang disebabkan karena terjadinya musim ikan yang baik, sehingga berpengaruh pada peningkatan penerimaan PNBP. Adanya penambahan pengajuan kontrak penggunaan tanah di lahan industry PPS Kendari, peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayaran PNBP.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian IKU antara lain tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi klausul kontrak perjanjian penggunaan tanah dan/atau bangunan yang perlu ditingkatkan.

5) Analisa Program/kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian PNPB di antaranya pada awal tahun dilaksanakan monitoring dan evaluasi capaian PNBP non SDA di tahun 2024

sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk selanjutnya dapat ditingkatkan lagi di tahun 2025. Terdapat 2 pelayanan yang dilakukan monev lebih lanjut yaitu terkait pas masuk dan tambat labuh yang perlu ditingkatkan pada tahun ini. Serta terdapat penandatanganan perjanjian pemanfaatan tanah dan bangunan di PPS Kendari dengan PT. Sartomo Sakti untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) seluas 6.3090 m², yang meliputi tanah bangunan industri seluas 3.331 m², bangunan gudang 2.960 m² dan gedung pos jaga 9 m². Terlampir beberapa kegiatan penunjang sebagai berikut:



Gambar 4. Kegiatan Penunjang Pencapaian PNBP Non SDA

3.2.2. Sasaran Kegiatan 2 – Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat

Pada Sasaran Kegiatan Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat terdapat 1 (satu) indikator yang mendukung yakni Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton).

Indikator Kinerja (IK-2) : Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Produksi Perikanan Tangkap merupakan hasil perhitungan dari volume produksi di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari. Realisasi produksi perikanan tangkap diukur dan dilaporkan secara berkala setiap bulan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja “Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 2					Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat				
Indikator Kinerja – 2					Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025
5.995	6.500	5.884	7.887,29	6.465,81	16.000	4.500	3.210,93	71,35	20,06

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian IKU pada triwulan ini sebanyak 3.210,93 ton atau hanya 71,35% dari target. Sumber produksi di PPS Kendari terdiri dari produksi dalam pelabuhan sebanyak 2.826,76 ton dan dari luar



pelabuhan sebanyak 384,17 ton. Adapun rekap produksi bulanan tersaji pada grafik di samping.

Grafik 3. Rekapitulasi Jumlah Produksi Triwulan I PPS Kendari

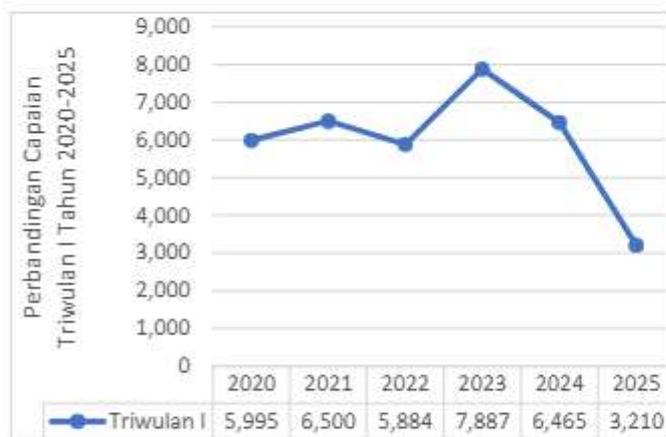
Apabila dihitung dalam rupiah, maka pendapatan produksi triwulan I dapat dilihat pada grafik di samping. Capaian tertinggi pada bulan Maret untuk ikan dalam dan bulan Februari pada ikan luar pelabuhan.



Grafik 4. Capaian Nilai Produksi Triwulan I PPS Kendari

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, volume produksi pada triwulan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu mencapai 3.255 ton



dan merupakan capaian terendah sepanjang 5 tahun terakhir. mengalami penurunan sebesar 1.422 ton (termasuk pada tahun 2022 jika dihitung dengan formula yang sama).

Grafik 5. Perbandingan Capaian Volume Produksi Triwulan I Tahun 2020-2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, capaian triwulan ini telah mencapai mencapai 20,06%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Tidak tercapainya IKU volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada triwulan I tahun 2025 ini disebabkan oleh cuaca

buruk, kerusakan mesin, dan perpanjangan izin kapal yang berkurang sehingga berdampak pada hasil tangkapan.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah pengarahan kepada petugas pendata terkait tugas dan fungsinya di lapangan serta aktivitas bongkar yang rutin di dermaga.



Gambar 5. Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU Volume Produksi Perikanan Tangkap

3.2.3. Sasaran Kegiatan 3 – Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab terdapat 5 (lima) indikator yang mendukung yakni 1) Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 2) Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 3) Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, 4) Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, dan 5) Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-3) : Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan. Sesuai dengan fungsi perusahaan tersebut berupa penyediaan dan/atau jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021, jenis PNBK yang berlaku di KKP di antaranya meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan melalui sewa lahan/ gedung/ bangunan yang mana dalam prosesnya diperlukan analisa dan atau evaluasi permohonan perusahaan.

Target IKU yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 100% dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan dokumen yang dianalisa dan dievaluasi perusahaan baru, perpanjangan, serta addendum dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Bulan	Nama Pengguna/Badan Usaha Perorangan/Instansi	Keterangan
Januari	Tidak ada permohonan	
Februari	1. CV. Ome Trading Coy	Perpanjangan Kontrak
Maret	1. Koperasi Pemasaran Perikanan Bina Insan Bahari	Perpanjangan Kontrak

Indikator Kinerja (IK-4) : Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Dalam upaya menilai tingkat kinerja operasional yang didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional kelas pelabuhan perikanan (sesuai SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 20/KEP-DJPT/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan, perubahan atas SK Dirjen Perikanan Tangkap No. 432/DJPT.3/OT.220.D3/I/2008). Sebagai bagian dari kegiatan manajemen untuk menilai kinerja pelabuhan perikanan. Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi 1). Administrasi dan Sistem Informasi (9 parameter), 2) Fasilitas Pelabuhan Perikanan (6 parameter), 3) Pelayanan Umum (9 parameter), 4) Investasi dan Industri (3 parameter).

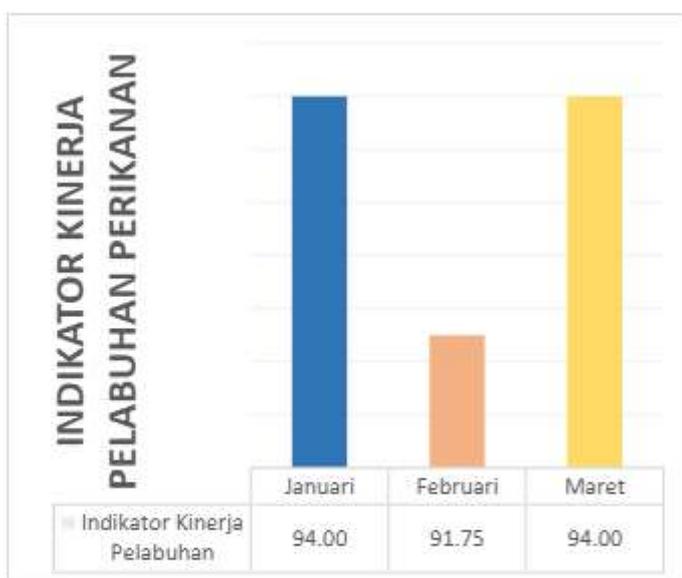
Berikut parameter yang tertuang pada aplikasi PIPP yaitu: (1) Frekuensi pengiriman data (PIPP), (2) E-Logbook, (3) Aplikasi SPB Online, (4) SHTI, 5. Realisasi penyerapan anggaran, 6. Pendapatan pelabuhan, 7. Ketersediaan SDM Pengolah PP, (8). Kapasitas Daya Tampung kolam pelabuhan, (9) Panjang Dermaga (10) Kedalaman Kolam (11) Sarana Pelabuhan (Docking, Bengkel) (12) Kelengkapan Fasilitas pemasaran dan distribusi ikan (13) Ketersediaan lahan pelabuhan (14) Pelayanan Tambat Labuh (15) Produksi perikanan (16) Frekwensi kunjungan Kapal (17) STBLKK (18) Sosialisasi dan BIMTEK (19) Fasilitas Penyuluhan, Pengawasan dan Pengendalian SDI, Perkarantinaan ikan, Publikasi (20) Pelaksanaan K5 (21) Penyaluran air bersih (Kapal dan Industri pengolahan) (22) Penyaluran Es (Kapal) (23) Penyaluran BBM (Kapal) (24) Pelayanan Pengolahan Hasil Perikanan di WKOPP (25) Pemanfaatan Lahan Pelabuhan (26) Penyerapan Naker (27) Perubahan Jumlah Investor di Pelabuhan Perikanan. Adapun capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja "Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawa				
Indikator Kinerja – 4					Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
88	92,75	90,95	92,42	92,75	87	87	93,25	107,2	107,2

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 93,25 atau 107,2,42% dari target. Adapun rekapitulasi evaluasi kinerja aplikasi PIPP di PPS Kendari tersaji pada grafik di samping. Pada triwulan I, nilai indikator kinerja pelabuhan PPS Kendari konsisten mendapatkan nilai di atas 90 atau predikat SANGAT BAIK.



Grafik 6. Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2025

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024, IKU ini mengalami peningkatan sebesar 0,5. Walaupun peningkatan ini tidak signifikan, namun dapat dijadikan sebuah motivasi agar dapat memaksimalkan capaian pada setiap indikator di aplikasi PIPP.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan capaian pada 5 tahun terakhir, capaian pada triwulan ini merupakan capaian tertinggi dengan nilai yaitu 93,25.



Grafik 7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I Tahun 2020-2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 107,2%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 93,25 atau 107,2%. Tercapainya target ini tidak terlepas kerja sama dan koordinasi antartim kerja lingkup PPS Kendari dengan memproporsikan anggaran berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Selama triwulan I, PPS Kendari memperoleh penghargaan dari Direktur Kepelabuhanan Perikanan terkait hasil penilaian evaluasi kinerja pelabuhan dengan kategori SANGAT BAIK.



Gambar 6. Sertifikat Penghargaan Indikator Kinerja Pelabuhan Triwulan I dengan predikat SANGAT BAIK

5) Analisa Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari seperti kegiatan Evaluasi Data PIPP dalam rangka mendukung kebijakan PIT yang akan dilaksanakan pada semester I nantinya.

Indikator Kinerja (IK-5) : Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

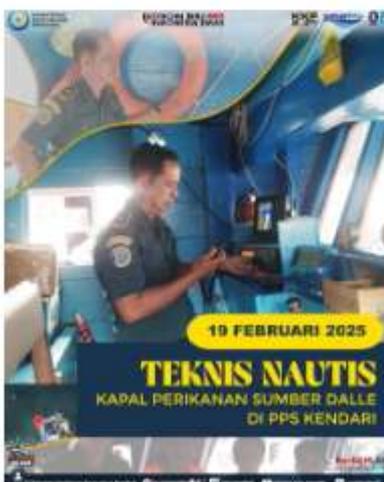
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Dalam manual IKU, formula perhitungan dari ketiga pelayanan ini dibobot lalu dijumlahkan. Target dari IKU ini sebesar 85% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian bulanan SPB, STBLKK, jumlah kapal berpangkalan, SHTI, dan Revisi/Penolakan SHTI dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Bulanan Indikator Kinerja "Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Bulan	UKURAN				
	Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	STBL Kedatangan Kapal	Kapal Berpangkalan	Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan	Revisi/ Penolakan SHTI
Januari	576	515	373	0	0
Februari	451	514	396	0	0
Maret	434	418	398	0	0
TOTAL	1461	1447	1167	0	0

Pada triwulan I ini juga beberapa kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari seperti pemeriksaan teknis nautis kapal secara rutin dan sosialisasi implementasi penangkapan ikan terukur pasca terbitnya surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2403/MEN-KP/XII/2024.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan teknologi pemantauan kapal yang dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perikanan, mencegah praktik penangkapan ilegal, serta meningkatkan efisiensi operasional para pelaku usaha perikanan. Beberapa hal dibahas diantaranya terkait harga alat termasuk opsi pembayaran dengan angsuran, kemudahan dalam menemukan teknisi jika alat mengalami kendala, dan beberapa keunggulan dari pemasangan VMS diatas kapal perikanan. Dalam paparannya Kepala PPS Kendari menekankan kembali terkait isi dari Surat Edaran Menteri No.



B.2403/MEN-KP/XII/2024 tentang Transisi Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Selain itu, juga menjelaskan terkait penyesuaian layanan di PPS Kendari selama efisiensi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri perikanan dapat lebih memahami pentingnya penggunaan alat pemantau sehingga memudahkan pengawasan serta meningkatkan transparansi dalam operasional kapal perikanan.

Gambar 7. Kegiatan Penunjang Pencapaian Tingkat Kinerja Kesyahbandaran

Indikator Kinerja (IK-6) : Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang. Pelabuhan Perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Target IKU tahun 2025 ini sebesar 80% dengan perhitungan tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja "Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

No	Uraian Pekerjaan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Pemeliharaan pagar kawasan	60.000.000	59.800.000	200.000
2.	Pemeliharaan sumur dalam dengan pompa (3 unit x 2 kali)	22.500.000	7.500.000	15.000.000
3.	Pemeliharaan atap kantin	39.000.000	38.900.000	100.000
4.	Pemeliharaan rusun	101.037.000	38.030.000	63.007.000
5.	Pemeliharaan drainase	25.000.000	24.900.000	100.000
6.	Pemeliharaan sound system	24.200.000	24.200.000	0
7.	Pemeliharaan jaringan listrik dan lampu jalan	75.000.000	49.800.000	25.200.000

Adapun kegiatan penunjang dalam pencapaian IKU ini yang telah dilakukan selama triwulan I antara lain pemeliharaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), instalasi air bersih, dan pompa instalasi pengolahan air limbah.



Gambar 8. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator Kinerja (IK-7) : Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan pelabuhan perikanan yang mengoperasikan pelabuhan perikanan harus: 1) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan, 2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

Menindaklanjuti hal tersebut, KKP telah memiliki suatu sistem informasi web yang disebut dengan SELARASKAN. Melalui aplikasi ini, tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan dapat dimonitoring mulai dari program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang dimutakhirkan secara berkala dan dicantumkan dalam bentuk skor pelabuhan. Adapun formula perhitungan dari aplikasi SELARASKAN ini adalah

Skor keseluruhan = Skor Indikator Program (60%) + Skor Indikator Hasil (40%).

Skor indikator program adalah program *mandatory* yang wajib dimutakhirkan dan *voluntary* (Program tidak wajib berjalan di pelabuhan perikanan) serta indikator hasil terdiri dari kebersihan pelabuhan, pengelolaan sampah, kualitas

udara, kualitas air, penggunaan listrik, penggunaan air, pengelolaan limbah B3, dan kepatuhan regulasi.

Kategori yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Tata Kelola Lingkungan Pelabuhan Perikanan (SELARASKAN) terdiri dari:

1. Kurang : 0 – 30
2. Cukup : >30 – 60
3. Baik: >61 – 80
4. Sangat Baik: >81 – 100

Target IKU tahun 2025 ini sebesar 30,10 dengan periode pengukuran triwulanan.

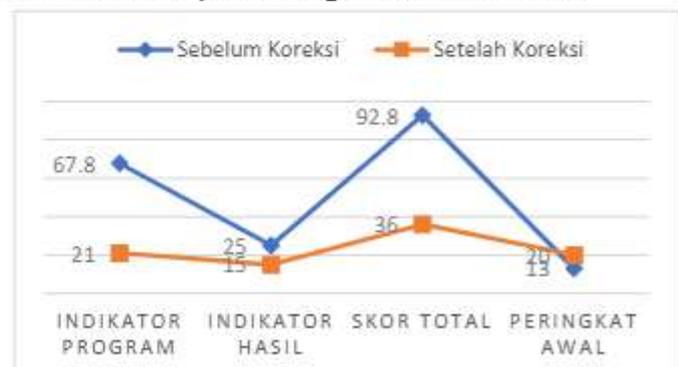
Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Pengendalian Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 3					Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja – 7					Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	34,87	30,10	30,10	86,83	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 86,83 atau 120% dari target. Adapun capaian implementasi SELARASKAN bulan Januari hingga Maret 2025 yang telah dikoreksi *evidence* oleh tim evaluasi SELARASKAN tersaji pada grafik di samping.





Grafik 8. Capaian Nilai Pengendalian Lingkungan Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2024, capaian di tahun ini meningkat signifikan yaitu 51,96.

Grafik 9. Capaian Bulanan Nilai Pengendalian Lingkungan

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

Grafik 10. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan



4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian IKU di triwulan ini yang melebihi target dipengaruhi oleh kedisiplinan petugas untuk melakukan pencatatan dan penginputan ke dalam aplikasi SELARASKAN.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja nilai pengendalian lingkungan diantaranya adalah kegiatan rutin terkait aktivitas kebersihan Kawasan Pelabuhan dengan menghitung muatan sampah organik dan anorganik, kerja bakti di lingkungan Pelabuhan, serta pemantauan fasilitas pengolahan air limbah. Pada tahun ini juga karena adanya efisiensi anggaran, maka dibentuk Tim Hemat Energi yang bertugas untuk mengevaluasi



konsumsi energi, merumuskan strategi penghematan, serta menyusun langkah konkret guna mengurangi biaya operasional tanpa mengganggu aktivitas pelabuhan.



Gambar 9. Kegiatan Penunjang Pencapaian Nilai Pengendalian Lingkungan

3.2.4. Sasaran Kegiatan 4 – Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 2 (dua) indikator yang mendukung yaitu (1) Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dan (2) Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Indikator Kinerja (IK-8) : Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah dokumen kapal perikanan (sertifikat kelaikan kapal) yang diterbitkan oleh Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Target IKU di tahun 2025 adalah sebanyak 2333 kapal dengan periode pengukuran triwulanan. Adapun capaian pada IKU ini terlampir pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja "Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 4					Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 8					Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	1408	2333	2293	2549	111,16	109,25

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target IKU ini sebesar 2333 kapal atau 111,16% dari target. Pada tahun 2024 yang lalu, capaian dokumen kapal yang diterbitkan sebanyak 2283 dan sesuai dengan manual IKU tahun 2025, capaian ini dapat ditambahkan dengan capaian yang ada pada triwulan I. Adapun rincian sertifikat kelaikan kapal perikanan (SKKP) yang diterbitkan setiap bulan tersaji pada grafik di bawah ini:



Grafik 11. Rekapitulasi Capaian Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2024, pada tahun ini jauh lebih meningkat sebanyak 110 kapal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan baru dalam proses perpanjangan SKKP melalui Surat Edaran Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.



Grafik 12. Perbandingan Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah Triwulan I

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 109,25%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Adapun analisa dari faktor-faktor yang menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini antara lain meningkatnya kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha/pemilik kapal terhadap regulasi dan ketentuan perizinan serta adanya kemudahan yang diberikan oleh KKP dalam proses perpanjangan SKKP melalui Surat Edaran Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang IKU ini yaitu sosialisasi Technical Cooperation Guidelines (TCG) di desa Mola Selatan, Kabupaten Wakatobi. Dalam sosialisasi dijelaskan bahwa TCG adalah bagian dari hubungan kerja sama RI-RRT di bidang perikanan. Dalam perjanjian ini juga mengatur terkait area kerjasama yang meliputi bidang perikanan tangkap dan pengolahan produk perikanan, daerah penangkapan ikan yang terdiri dari 3 zona serta kolaborasi untuk memastikan



memenuhi kesejahteraan pekerja perikanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah penangkapan ikan dengan peningkatan sektor hilirisasi hasil perikanan.

Gambar 10. Kegiatan Penunjang Pencapaian Kapal Perikanan Izin Daerah

Indikator Kinerja (IK-9) : Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024. Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan. Tingkat pemenuhan dibagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. Nilai $\leq 0,25$ = Kategori "Kurang",
2. Nilai $> 0,25$ s.d $< 0,50$ = Kategori "Cukup",
3. Nilai $> 0,50$ s.d $< 0,75$ = Kategori "Baik",
4. Nilai $> 0,75$ s.d $1,00$ = Kategori "Sangat Baik".

Untuk mendapatkan nilai IKU ini diformulasikan dengan perhitungan jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah masing-masing kepatuhan di setiap range GT kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT kapal yang terdapat di pelabuhan.

Target IKU di tahun 2025 adalah sebesar 0,26 dengan periode pengukuran semester sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan di Desa Mola Selatan, Kab. Wakatobi pada tanggal 22-23 Januari 2025. Sebanyak 23 orang peserta hadir untuk mengikuti materi terkait Prinsip Penanganan ikan diatas kapal, Kemunduran mutu Ikan, Persyaratan sanitasi dan higienis, pemeliharaan mutu, standar pembongkaran ikan, pengendalian potensi dan bahaya kontaminasi, ketelurusan SCIPB Kapal.



2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sertifikat Kecapakan Nelayan yang berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 24-25 Januari 2025 bertempat di Aula BPD Desa Mola Selatan Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi. Sebanyak 32 orang nelayan menerima materi terkait pengetahuan dasar operasi penangkapan ikan, alat tangkap, keselamatan kerja dan praktek pertolongan pertama saat terjadi kecelakaan diatas kapal..



Gambar 11. Kegiatan Bimbingan Teknis SKPI dan SKN di Kab. Wakatobi

3.2.5. Sasaran Kegiatan 5 – Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pada Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 9 (sembilan) indikator yang

mendukung yaitu: (1) Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (2) Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (3) Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (4) Indeks Profesionalitas ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks), (5) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (6) Presentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen), (7) Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai), (8) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, (9) Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Indikator Kinerja (IK-10) : Nilai PM Pembangunan Zona Integritas Pelabuhan Perikanan

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan, pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kerja. Secara teknis unit kerja tersebut harus memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 dan mencapai nilai 45,10 bagi Duaan kerja yang belum atau akan dicanangkan menuju WBK.

Nilai kinerja reformasi birokrasi KKP diperoleh dari indeks reformasi birokrasi hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap komponen proses yang mencakup 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil yang mencakup 3 (tiga) komponen. Komponen tersebut adalah:

1. Manajemen perubahan;
2. Penataan tata laksana;
3. Penataan manajemen SDM aparatur;
4. Penguatan akuntabilitas;
5. Penguatan pengawasan;

6. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Target nilai capaian pembangunan zona Integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 75,5 dengan periode pengukurannya adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, kegiatan penunjang pencapaian Nilai PM WBK ini beberapa telah dilaksanakan antara lain komitmen bersama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat perikanan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.



Gambar 12. Penunjang Pencapaian Nilai PM WBK ZI

Indikator Kinerja (IK-11) : Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Merupakan indikator yang menilai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP audit, reviu, dan evaluasi baik untuk bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 sd tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan. Target IKU ini adalah 85 dengan periode pengukurannya adalah triwulanan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja “Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari” Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 11					Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	100	85	85	100	117,65	117,65

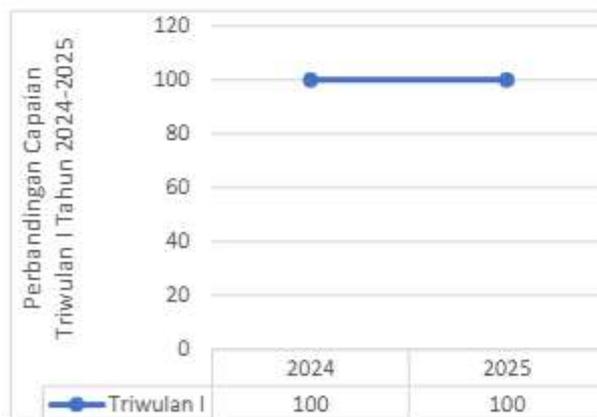
1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Seluruh hasil reviu dan evaluasi telah ditindaklanjuti di aplikasi SIDAK pada triwulan I Tahun 2025.



Grafik 13. Grafik Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya



Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya, capaian tahun ini sama yaitu bernilai 100% yang artinya tidak terjadi penurunan capaian dan perlu dipertahankan pada triwulan selanjutnya.

Grafik 14. Perbandingan Capaian Presentase Hasil Rekomendasi Pengawasan Triwulan I

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 117,65%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di triwulan I tahun 2025 disebabkan oleh terpenuhinya LHP audit, revidu, dan evaluasi yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) pada aplikasi SIDAK.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain kegiatan monitoring dan evaluasi pelaporan yang rutin dilaksanakan.



Gambar 13. Kegiatan Penunjang Pencapaian Presentase Hasil Pengawasan Triwulan I

Indikator Kinerja (IK-12) : Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator penilaian mandiri SAKIP adalah indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dihitung berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian dalam evaluasi atas implementasi SAKIP yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja

(30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Adapun kategori dan predikat penilaian mandiri SAKIP sebagai berikut:

Tabel 16. Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50 – 60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Target Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah 88 dengan periode pengukuran adalah tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, adapun capaian kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tanggal 24 Januari 2025 sebagaimana terlampir.

Pengukuran IP sangat bermanfaat bagi ASN sendiri, instansi pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Nota Dinas Plt. Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 504/SJ.3/RC.610/III/2025 tentang Hasil Rapat Pembahasan Perubahan Pengukuran Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN dan Penyesuaian Target Tahun 2025 s.d 2029 tanggal 13 Maret 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 terdapat beberapa penyesuaian pada pengukuran Indeksi Profesionalitas ASN yaitu:
 1. Nilai Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
 2. Indikator dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata Satu);/ D-IV (Diploma Empat);
 - d. Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Pendidikan D-II (Diploma Dua) /D-I (Diploma Satu) /Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat, dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA
 3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga pengukuran bobot dimensi kualifikasi berubah menjadi:
 - a. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal lebih tinggi/ di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 25;
 - b. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 20;

- c. ASN yang memperoleh ijazah pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki akan diberikan bobot nilai 10;

Bobot dimensi kualifikasi pendidikan tersaji sebagai berikut:

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DI / DI / SLTA / Sederajat	DI Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Gambar 17. Perhitungan Dimensi Kualifikasi Pendidikan IP ASN

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala BKN 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 pada tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan terdiri:
- Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya;
 - Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:
 - Diklat kepemimpinan (khusus bagi jabatan manajerial);
 - Diklat fungsional (khusus bagi jabatan fungsional);
 - Diklat teknis (khusus bagi jabatan pelaksana); dan
 - Pengembangan kompetensi 20 JP dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK.
- Pengukuran dimensi kompetensi adalah sebagai berikut:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
	- Sangat Kurang	5	5	5	5	5
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
	- Belum	0	0	0	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
	- Belum	-	-	-	0	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
	- Belum	-	-	-	-	0
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
	>= 24 JP	5	5	5	5	5
	<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional

Gambar 18. Perhitungan Dimensi Kompetensi IP ASN

5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

Gambar 19. Perhitungan Dimensi Kinerja IP ASN

6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 tahun terakhir yang mencakup:
- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - Hukuman disiplin ringan;
 - Hukuman disiplin sedang;
 - Hukuman disiplin berat

Pengukuran dimensi disiplin adalah sebagai berikut:

Dimensi	Nama Hukuman Disiplin	Bobot Nilai
Disiplin	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Gambar 20. Perhitungan Dimensi Disiplin IP ASN

7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah diperbaharui dengan pemutakhiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
 - b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemutakhiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator SIASN BKN;
 - c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat kinerja pada SIASN BKN; dan
 - d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.
8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri dari:
- a. Kualifikasi memiliki bobot 25%;
 - b. Kompetensi memiliki bobot 40%;
 - c. Kinerja memiliki bobot 30%;
 - d. Disiplin memiliki bobot 5%
9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi IP ASN, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IP\ ASN = Nilai\ Kualifikasi + Nilai\ Kompetensi + Nilai\ Kinerja + Nilai\ Disiplin$$

$$IP\ ASN\ Unit\ Organisasi = \frac{Total\ Nilai\ IP\ ASN\ seluruh\ pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}{Jumlah\ Pegawai\ ASN\ unit\ Organisasi}$$

10. Kategori penilaian tingkat Indeks Profesionalitas ASN antara lain:

Nilai	Kategori
91-100	Sangat tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
60 ke bawah	Sangat rendah

Gambar 21. Kategori Penilaian Tingkat IP ASN

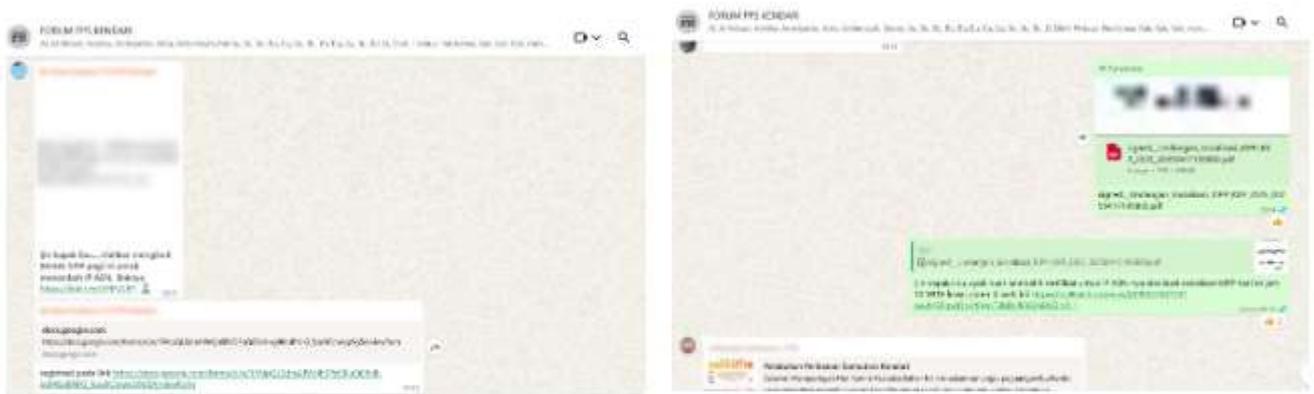
11. Penilaian IP ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN yang terdiri dari:

- a. PNS, dan
- b. PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian IP ASN.

12. Penilaian IP ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- a. CPNS;
- b. Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- c. Dipekerjakan (DPK);
- d. Tugas Belajar Dibiayai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, target IKU IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari adalah sebesar 86 dengan pelaporan semester sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, arahan terkait IP ASN telah disebarakan melalui *Whatsapp Group* PPS Kendari dan imbauan untuk mengikuti diklat/seminar pada e-Milea sebagaimana terlampir:



Gambar 22. Pemberitahuan terkait IP ASN melalui *Whatsapp Group* PPS Kendari

Indikator Kinerja (IK-14) : Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrument penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Renacan Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu

pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Presentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat 1. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase SIRUP: } \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Target Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SIRUP di Samudera Kendari adalah 76 dengan periode pengukuran adalah triwulan. Capaian IKU ini terlampir pada tabel di bawah berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 14					Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang dimumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realiasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76	76	100	120	120

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 100% atau 120% dari target tahunan. Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari telah melakukan revisi RUP ada aplikasi SiRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun. Adapun hasil perhitungan capaian indikator ini tersaji pada tabel berikut:

Tabel 18. Hasil Perhitungan Capaian "Presentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SiRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Kertas Kerja Klarifikasi (file Excel)			Rekap RUP Terumumkan (Aplikasi SIRUP)		
RUP Eksisting	Nilai Identifikasi	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
Pagu Terumumkan	Efisiensi Belanja	Pagu Terumumkan	Selisih Kertas Kerja - SiRUP	Pagu Terumumkan	%
40.131.847.000	5.582.775.000	34.549.072.000	0	34.549.072.000	100%

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja ini merupakan IKU yang baru di tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya. .

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 120%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Capaian pada IKU ini melebihi target di triwulan I tahun 2025 disebabkan oleh terinputnya seluruh paket pengadaan barang/jasa di aplikasi SiRUP.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU ini antara lain penginputan paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dan pencatatan hasil pengadaan barang/jasa pada aplikasi AMEL.

Indikator Kinerja (IK-15) : Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang dikelola dengan baik dan efisien. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur mengenai Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, Penggunaan,

Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, belum dapat dilaksanakan secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan yang penanganannya. Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan persentase pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang telah dilaksanakan dengan ketentuan yang berlaku. Persentase pengelolaan BMN ini diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- a. Tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN) (12,5%)
- b. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (25%)
- c. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%)
- d. Penggunaan BMN hasil pengadaan barang modal yang didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian (bobot 25%)
- e. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%)

Target presentase pengelolaan BMN kerja Perikanan Samudera Kendari adalah 81 dengan periode pengukuran tahunan sehingga belum dilakukan perhitungan pada triwulan ini. Namun, beberapa kegiatan telah dilaksanakan seperti Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan Semester II TA. 2024, Pendampingan tim survei KPKNL dan tindakanjuit penghapusan BMN melalui Lelang non eksekusi wajib.



Gambar 23. Kegiatan Penunjang Pencapaian Persentase Pengelolaan BMN

Indikator Kinerja (IK-16) : Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Pencapaian indikator ini yakni nilai kinerja anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan yang merupakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Adapun aspek yang dinilai adalah aspek implementasi yang terdiri atas 12 (dua belas) komponen yakni (1) Revisi DIPA (2) Halaman IV DIPA (3) Pengelolaan UP (4) Rekon LPJ Bendahara (5) Data Kontrak (6) Penyelesaian Tagihan (7) Penyerapan Anggaran (8) Retur SP2D (9) Perencanaan Kas (10) Pengembalian SPM (11) Dispensasi Penyampaian SPM, dan (12) Pagi Minus. Adapun pengelompokan hasil penilaian adalah sebagai berikut :

- a. Revisi DIPA, dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per Satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap), dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

- b. Halaman IV DIPA, Dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana (% gap realisasi terhadap rencana). Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Rata - rata } \left\| \frac{((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA}))}{(\text{Perencanaan Hal II DIPA})} \right\|$$

- c. Pengelolaan UP, Dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh record GUP yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \times 100$$

- d. Rekon LPJ Bendahara, Dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang di sampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

- e. Data Kontrak, dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

f. Penyelesaian Tagihan, Dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data, dengan rumusan sebagai berikut:

g. Penyerapan Anggaran, dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk I sebesar 15%, II

$$\left(\frac{\Sigma \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk I sebesar 15%, II

$$\left(\frac{\Sigma \text{Realisasi Anggaran}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

40%, III sebesar 60% dan sebesar 90%. K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas di berikan nilai maksimal, dengan rumusan sebagai berikut:

h. Retur SP2D, dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan Jumlah SP2D yang terbit, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Retur SP2D}}{\Sigma \text{SP2D}} \right) \times 100$$

i. Perencanaan Kas, dihitung berdasarkan rasio Renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\Sigma \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

j. Pengembalian SPM, dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian/Lembaga (Jumlah SPM yang diterbitkan KL termasuk Jumlah SPM yang salah/ditolak). Dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{SPM salah}}{\Sigma \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

k. Dispensasi penyampaian SPM, dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L (Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak) dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Dispensasi SPM}}{\Sigma \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

l. Pagu Minus, dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya, dengan rumusan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\Sigma \text{Pagu Minus}}{\Sigma \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan setiap bulannya dengan mengacu kepada realisasi dua belas komponen yang terdapat pada Monev PA

Pada Aplikasi OM- SPAN. Target nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Tahun 2024 ini adalah sebesar 92 dengan periode pelaporan adalah semester sehingga belum dilakukan pengukuran pada triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-17) : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator yang menunjukkan pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA/KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks.

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan dengan target sebesar 86 dan periode pelaporan adalah tahunan. Sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 tentang Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024, formula IKU ini diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Nilai kinerja perencanaan anggaran diperoleh melalui pengukuran atas:

- a. Variabel efektivitas (bobot 75%) yang didasarkan pada capaian Rincian Output (RO) pada level satuan kerja, capaian indikator kinerja program pada level unit EselonI, dan capaian indikator kinerja sasaran strategis pada level K/L, dan;
- b. Variabel efisiensi (bobot 25%) yang didasarkan pada hasil perbandingan antara indeks realisasi anggaran dengan indeks standar biaya keluaran (SBK) sesuai PMK Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan RO pada RKA-K/L TA. 2025 yang diwajibkan menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) sebagai dasar penilaian kinerja perencanaan anggaran TA. 2025..

Pengukuran indikator ini mengacu pada hasil perhitungan dari aplikasi Monev Kemenkeu dengan target sebesar 71 dan periode pelaporan adalah tahunan sehingga belum dapat dilakukan pengukuran pada triwulan ini.

Indikator Kinerja (IK-18) : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Indikator ini merupakan indikator IKU baru yang menunjukkan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (PermenPAN RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Perhitungan IKU ini melihat dari hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (Persyarata layanan, kemudahan prosedur, waktu penyelesaian, kesesuaian biaya, kesesuaian produk, kecepatan produk, kemudahan fitur/kemampuan petugas, kualitas isi/sarana, layanan konsultasi). Hasil perhitungan ini diperoleh dari aplikasi SI SUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindaklanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Target IKU ini sebesar 88,50 dengan periode pelaporan adalah triwulan. Adapun capaian pada IKU ini tersaji pada tabel di bawah ini:

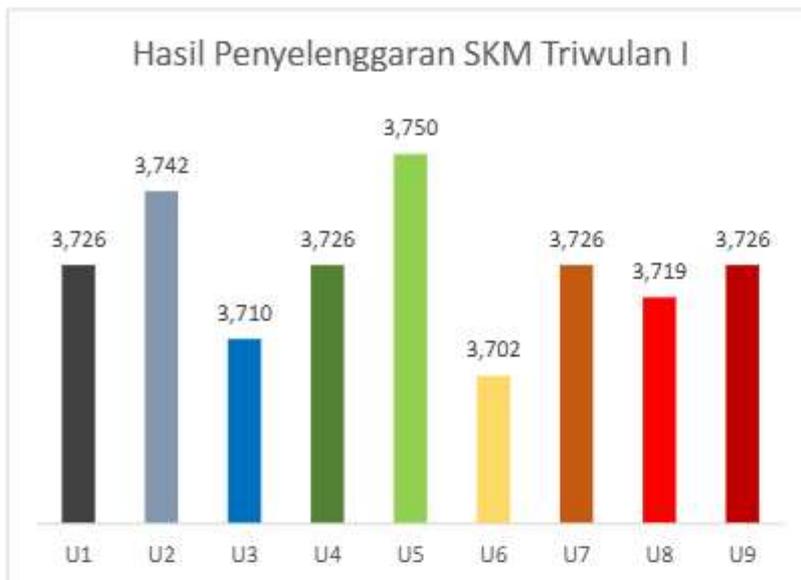
Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja "Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Kegiatan – 5					Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Indikator Kinerja – 18					Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari				
Realisasi Triwulan I Tahun 2020 – 2024					Realisasi Tahun 2025				
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target TW I	Realisasi TW I	% Realisasi thd Target TW I 2025	% Realisasi thd Target Tahun 2025
N/A	N/A	N/A	N/A	92,14	88,50	88,50	93,10	105,2	105,2

1) Perbandingan Target dengan Realisasi Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian target adalah sebesar 93,10 atau 105,20% dari target tahunan. Jumlah responden pada triwulan I ini berjumlah 124 orang. Seluruh unsur pelayanan (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur, U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5

Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon/Kompetensi Petugas, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan



Konsultasi) mendapatkan nilai lebih dari 3 (tiga) dengan nilai rata-rata 3,73. Adapun rincian hasil SKM terlampir sebagaimana grafik di samping.

Grafik 15. Grafik Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan I

2) Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan capaian IKU pada triwulan di tahun sebelumnya,



capaian pada tahun ini sebesar 0,95 poin. Jumlah responden di tahun ini tidak sebanyak responden triwulan tahun lalu, namun kualitas pengisian lebih baik daripada tahun sebelumnya.

Grafik 16. Perbandingan Capaian SKM Triwulan I Tahun 2024 – 2025

3) Perbandingan antara Realisasi Kinerja terhadap Target Tahunan

Apabila dibandingkan dengan target tahunan, IKU ini telah mencapai target sebesar 105,2%.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Pencapaian IKU ini adalah sebesar 93,10 atau 105,2% yang melebihi dari target triwulan I tahun 2025. Terdapat 4 unsur pelayanan yang mendapat nilai tertinggi yaitu unsur kesesuaian produk yaitu 3,750, unsur kemudahan prosedur dengan nilai 3,742, dan unsur persyaratan layanan dan kualitas isi/sarana dengan nilai

yang sama yaitu 3,726. Capaian triwulan ini cenderung meningkat dari triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 89,10 dengan jumlah responden yang cukup jauh signifikan. Kualitas pengisian pada triwulan ini cenderung lebih baik dari tahun sebelumnya.

5) Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang kinerja pencapaian IKU yang telah dilakukan pada triwulan I ini adalah publikasi hasil SKM melalui sosial media.



Gambar 24. Publikasi Nilai SKM Triwulan I pada Sosial Media

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari pada tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp51.259.064.000 sesuai dengan DIPA Ditjen Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2025. Realisasi anggaran sampai triwulan I sebesar Rp4.277.912.972 atau 8,35%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagai berikut:

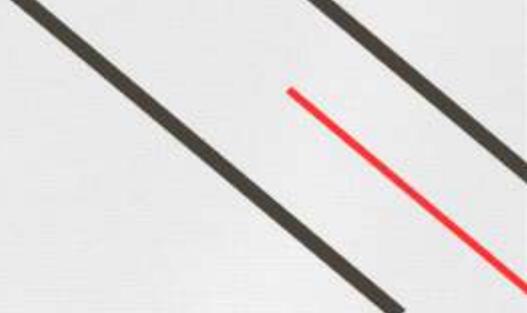
Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pegawai	10.163.200.000	2.765.703.395	27.21
2.	Barang	11.438.344.000	1.512.209.577	13.22
3.	Modal	29.657.520.000	0	0

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
	Jumlah	51.259.064.000	4.277.912.927	8,35

Tabel 21. Pagu dan Realisasi Keuangan Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Kegiatan

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	
			Nilai (Rp)	Capaian (%)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000	280.797.912	0.87
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000	1.922.000	5.65
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000	3.995.193.060	21.07
	Jumlah	51.259.064.000	4.277.912.972	8.35



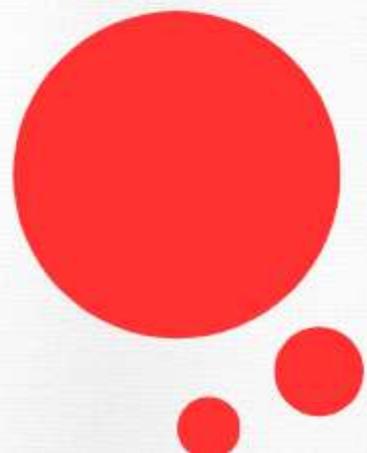
BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 TINDAKLANJUT REKOMENDASI
PERIODE SELANJUTNYA

4.3 REKOMENDASI TINDAKLANJUT



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari merupakan salah satu unit eselon eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perikanan tangkap. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah diterapkan dalam Renstra PPS Kendari dan Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Laporan Kinerja (LKj) Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Triwulan I Tahun 2025 menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) selama triwulan I Tahun 2025. Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian IKU tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan.

Dalam rangka peningkatan kinerja PPS Kendari, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di triwulan selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, pada Nilai Capaian Sasaran Strategis (NPSS) PPS Kendari sebesar 102,72 atau berpredikat **BAIK**. Capaian keseluruhan indikator yang dilaporkan pada triwulan ini adalah sebanyak 4 (enam) IKU & IKM bernilai Istimewa (nilai di atas 110), 3 (Tiga) IKU & IKM bernilai Baik (nilai 90- <110), dan 1 (Satu) IKU bernilai Cukup (nilai 70- <90). Hasil evaluasi realisasi kegiatan dan anggaran pada triwulan I tahun 2025 tercapai Rp4.277.912.972 atau sebesar 8,35% dari total pagu sebesar Rp51.259.064.000.

4.2. TINDAK LANJUT REKOMENDASI PERIODE SEBELUMNYA

Adapun rekomendasi perbaikan pada periode sebelumnya yaitu triwulan IV tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada periode ini yaitu:

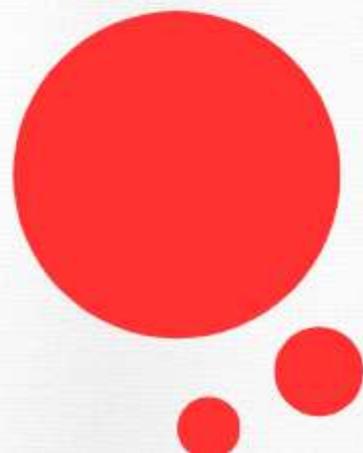
1. Melakukan evaluasi terhadap capaian PNBPN di tahun 2024 dengan berkolaborasi bersama tim kerja pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandaran, dan bendahara penerimaan. *(Data dukung terlampir)*
2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya. *(Data dukung terlampir)*

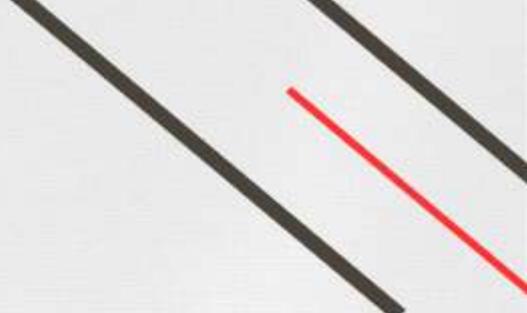
4.3. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan pembahasan pencapaian indikator kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari triwulan I tahun 2025, rekomendasi/hal yang disarankan untuk peningkatan kinerja guna pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

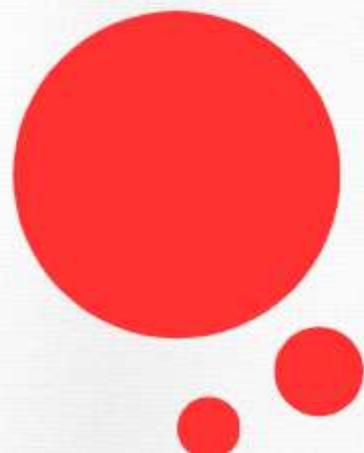
1. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian target produksi perikanan tangkap.
2. Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya.

LAMPIRAN





**PERJANJIAN
KINERJA
TAHUN 2025**





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Syahril Abd. Raup**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

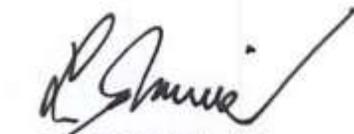
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Syahril Abd. Raup

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7,241.04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Perusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
5	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (yang telah dinilai WBK) (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

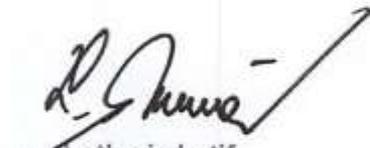
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

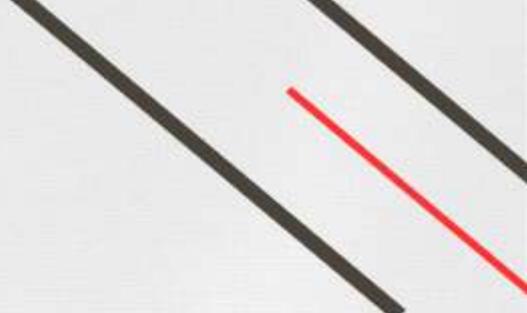
Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,


Lotharia Latif

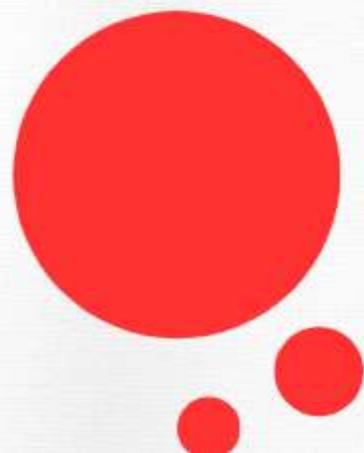
Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,


Syahril Abd. Raup



PERJANJIAN KINERJA

PERUBAHAN I TAHUN 2025





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 19
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Asep Saepulloh**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,



Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Asep Saepulloh

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	1 Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Rp. Juta)	7.241,04
2	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Meningkat	2 Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Ton)	16.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3 Persentase Permohonan Pengusahaan yang Dianalisa dan/atau Dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	100
		4 Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	87
		5 Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		6 Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	80
		7 Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	30,10
		8 Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	2333
		9 Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,26
4	Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan, dan Alat Penangkapan Ikan yang Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari	10 Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	75,5
		11 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	85
		12 Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88
		13 Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Indeks)	87
		14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	76

NO	SABARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
15		Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Persen)	81
16		Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	92
17		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	71,5
18		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari (Nilai)	88,5

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	32.263.573.000
2.	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	34.010.000
3.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	18.961.481.000
Total Anggaran PPS Kendari Tahun 2025		51.259.064.000

Jakarta, 15 April 2025

Pihak Kedua
Plt. Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap,

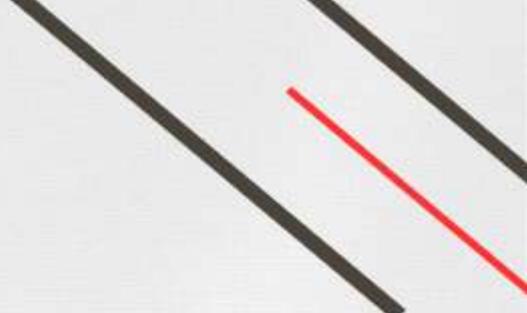


Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,

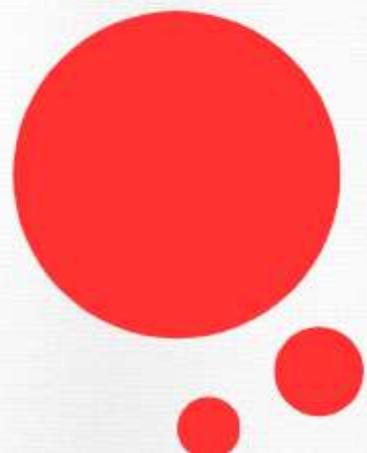


Asep Saepulloh



TINDAKLANJUT TRIWULAN I TAHUN 2024

Melakukan evaluasi terhadap capaian PNBP di tahun 2024 dengan berkolaborasi bersama tim kerja pelayanan usaha, tim kerja kesyahbandaran, dan bendahara penerimaan



NOTULEN RAPAT

A. Dasar :

Surat Undangan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Nomor B.133/PPSK/TU.330/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal Undangan Monitoring dan Evaluasi Capaian PNBP Non SDA Tahun 2024.

B. Pelaksanaan :

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Januari 2025
Jam : 09.30 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Cakalang
Agenda : Rapat Pembahasan Capaian PNBP Non SDA Tahun 2024
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat :

Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Januari 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian PNBP Non SDA Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari terdapat 2 jenis yaitu PNBP fungsional dan PNBP Umum yang sesuai dengan PP 85 Tahun 2021, PP 28 Tahun 2020 dan PP 47 Tahun 2023.
2. Capaian PNBP Tahun 2024 mencapai Rp7.183.182.742 berdasarkan penerimaan PNBP dari penggunaan sarana dan prasarana, jasa pelabuhan perikanan dan penerimaan umum dengan presentase 132%. Capaian tertinggi tahun 2024 pengadaan air namun mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023.
3. Rumah Susun Nelayan/Sewa
Tagihan PNBP yang telah memasuki tahap tagihan ketiga apabila belum dibayarkan oleh pelaku usaha maka sesuai dengan ketentuan akan diserahkan kepada Pihak KPKNL dengan konsekuensi pemutusan perjanjian. Pelaku usaha yang masuk dalam daftar piutang menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak.
4. Penggunaan Tanah
Memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan sewa didekat pintu masuk PPS Kendari untuk melakukan perbaikan bangunan, apabila tidak segera dilakukan perbaikan berpotensi pemutusan perpanjangan sewa.
5. Pas Masuk
Sebagai bahan evaluasi, Kepala PPS Kendari memberikan pengarahannya untuk tertib dalam memberlakukan pas masuk harian dan pas masuk berlangganan kepada setiap pengunjung dan pegawai. Memperbaiki pelaksanaan SOP penerimaan tamu wajib mencatat pada form yang telah disediakan. Selisih jumlah perolehan PNBP pas masuk (tamu) dibuatkan berita acara.

6. Pengadaan air

Kepala PPS Kendari memberikan pengarahan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan merencanakan pengadaan alat dan pemeliharaan untuk penyediaan jasa air. PPS Kendari dan pengawas melakukan inspeksi kepada pelaku usaha agar menggunakan jasa penyediaan sesuai dengan ketentuan (tidak membangun sumur bor secara mandiri).

Notulis,



Rully Indriani

DOKUMENTASI





DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal
Jam
Acara/Raport

Rabu, 8 Januari 2024
09.00 WIB
Raport Capaian PMSK Non LPM Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.	MURKHTANI	Operasional	
3.	DEBI SUTARSO	Pelayanan Usaha	
4.	Rechy	TUWP	
5.			
6.	DEDEN ZAINUDDIN	APST	
7.	DEBI MARTATI	APST/PU	
8.	Romy Rachmad-k	PST/PU	
9.	SUSTIAN SAMPATI	kegiatan bandaran	
10.	Emadati Saarnu	PU	
11.	Hardiansa	PU	
12.	Suntarsono	Bendahara Perikanan	
13.	Coxi Romangs	PU	
14.	MUH. IKRAM	Kesejahteraan	
15.	Rully Inriani	Tim Dukmor	
16.	Jamil	Tim Dukmor	
17.	Firdaus	TIM PU	
18.			
19.			
20.			

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Jl. Samudera No.1 Puday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : infoppskd@yahoo.co.id

Layanan Pengaduan



SCAN QR

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Januari 2025
Jam : 09.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Cakalang
Agenda : Rapat Pembahasan Capaian PNBP Pas Masuk Tahun 2024
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian PNBP Non SDA jenis Pas Masuk Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala PPS Kendari memberikan pengarahan kepada petugas pas masuk untuk tertib menjalankan SOP Pelayanan Pas Masuk serta membuka pelayanan penjualan kartu pas masuk berlangganan di lokasi pas masuk bagi pengguna jasa yang belum memiliki kartu pas masuk. Tim Pelayanan Usaha diharapkan dapat menyiapkan tempat pelayanan penjualan kartu pas masuk, perangkat, perlengkapan dan material pendukung dengan tenggat waktu 6 bulan.
2. Petugas pas masuk dan tim pelayanan usaha melakukan monitoring secara berkala pada opsi menu tombol tamu pada sistem pas masuk.
3. Bagi pengguna jasa yang merupakan mitra PPS Kendari yang memiliki keperluan dinas maka diberlakukan tombol T (tamu) dan petugas pas masuk mencatat dalam daftar tamu serta menyerahkan rekap kepada petugas pelayanan usaha. Pengguna jasa yang mengunjungi PPS Kendari dalam rangka tugas dinas memberikan bukti Surat Tugas atau Surat Undangan kepada petugas pas masuk.
4. Memberikan pengumuman kepada pegawai dan pengguna jasa untuk disiplin dalam menggunakan jasa pelayanan pas masuk, apabila lupa membawa kartu akan dikenakan biaya pas masuk harian.

Notulis,

Rully Indriani

DOKUMENTASI



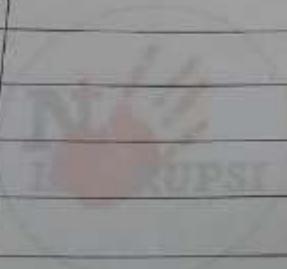


DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal
Jam
Acara/Kegiatan

Kendari, 9 Januari 2023
09.00 WITA
Rapat Pembahasan Capaian PNEP Pas Madat Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Syahrol Abet Raup	Kepada Pelabuhan	
2.	Pudi Santoso	Katunja PU	
3.	JIANARI	PU	
4.	Lexi Romanisa	PU	
5.	ABDULLAH. KADIR	PU	
6.	FIDRAUS	PU	
7.	Puryantu	PU	
8.	Romy Rachmad .k	PU	
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			



PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

Jl. Samudera No. 1 Poday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233

Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : info@ppskf@yahoo.co.id

Layanan Pengabdian



NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal	: Jumat, 10 Januari 2025
Jam	: 09.00 WITA - selesai
Tempat	: Ruang Rapat Cakalang
Agenda	: Rapat Pembahasan Capaian PNBPN Tambat Labuh Tahun 2024
Peserta	: Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Januari 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian PNBPN Non SDA jenis Tambat Labuh Tahun 2024 yang dipimpin oleh Kepala PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala PPS Kendari memberikan pengarahan kepada tim yang menangani tambat labuh untuk mengoptimalkan absensi kapal sehingga pencatatan kapal semakin optimal di Tahun 2025. Perubahan SOP Tambat Labuh:
 - a. Menambahkan terkait dengan data keberadaan kapal di pelabuhan (pada nomor 3 SOP Tambat Labuh).
 - b. Petugas menerima hasil absensi kapal, memeriksa jumlah hari dan jumlah jam keberadaan kapal di kolam.
2. Menambahkan SOP pelayanan fasilitas PPS Kendari yang berbayar seperti meja sortir.
3. Tim yang menangani SIJAKA menambahkan rencana keberangkatan tanggal bertolak kapal (bukan tanggal penerbitan SPB) di form yang diajukan untuk SPB. Syahbandar agar memeriksa jam kedatangan kapal. Data permohonan di SIJAKA dan SPB harus sama. Apabila waktu kedatangan kapal berbeda dengan yang diajukan maka berlaku mekanisme kurang bayar. Petugas agar memantau pergerakan kapal di ruang control room dan mencatat jam keluar kapal lalu memvalidasi dengan absensi kapal.
4. Tidak ada data yang berbeda antara pelayanan usaha dan syahbandar terkait dengan rencana keberangkatan. Penagihan manual oleh Bendahara Penerimaan dengan menggunakan billing dengan judul "kekurangan bayar" sehingga pembayaran masuk dalam tambat labuh. Tim keuangan agar melakukan pencatatan di google sheet terhadap kapal yang sudah lunas. Data di google sheet menjadi acuan Tim Syahbandar untuk menerbitkan SPB. Pada google sheet ditambahkan tanggal dan jam keberangkatan kapal. Kekurangan bayar hubungan antara Tim Syahbandar, Tim Pelayanan Usaha dan Tim Keuangan terkait SOP kekurangan bayar.
5. Tim syahbandar membuat form tambat labuh bagi kapal yang sedang perbaikan yang di dalam surat tersebut berisi syarat dan ketentuan yang berlaku.

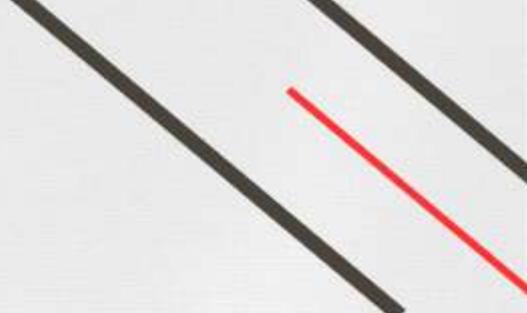
6. Penambahan SDM untuk memantau kamera CCTV di control room dan aktif berkomunikasi dengan tim yang ada di lapangan. Jika menemukan selisih jam maka segera direkap dan dilaporkan agar data Pelayanan Usaha dan Syahbandar sama.
7. Bagi kapal yang tambat labuh lama maka penagihan dalam 15 hari.
8. Bagi pelayanan pas masuk dibuatkan SOP pelayanan pas masuk khusus hari jumat untuk beribadah. Di hari jumat portal dibuka pada jam 11.30 – 13.00 WITA.

Notulis,

Rully Indriani

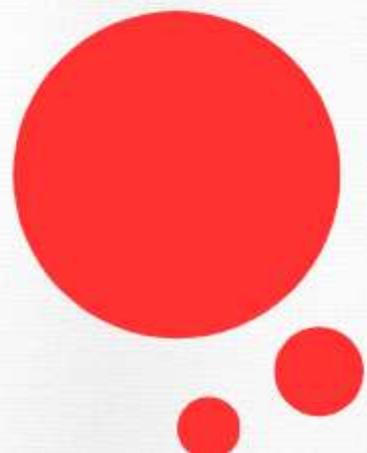
DOKUMENTASI





TINDAKLANJUT TRIWULAN I TAHUN 2024

Melakukan rapat evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI

JALAN SAMUDERA NO. 1 PUDAY, KENDARI, SULAWESI TENGGARA 93234

LAMAN www.kkp.go.id SUREL pps.kendari@kkp.go.id

Nomor : B.640/PPSK/TU.330/II/2025

18 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu lembar

Hal : Undangan

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari Tahun Anggaran 2025, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat pembahasan efisiensi anggaran PPS Kendari TA.2025, pada:

hari, tanggal : Selasa, 18 Februari 2025

waktu : 14.00 WITA s.d. selesai

tempat : Ruang Rapat Cakalang

Link Zoom:

<https://zoom.us/j/97076027896?pwd=LVIJg639Hf1BqsbULGwQdL6RN6J7bX.1>

Meeting ID: 970 7602 7896

Passcode: 678313

Demikian disampaikan, atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd. Raup

DAFTAR UNDANGAN

1. Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial
2. Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran
3. Ketua Tim Kerja Operasional Pelabuhan
4. Ketua Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana
5. Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha
6. Penanggung Jawab PP Untia
7. I Wayan Budiarta, SE
8. Ashar, S.E
9. Wa Ode Nuziani
10. Purwanto, S.St.Pi
11. Nurul Hikmah, S.I.Kom
12. Saiful Ramadhan, S.Tr.Pi
13. Nuslim
14. Sapta Kurniawan

Kepala Pelabuhan Perikanan
Samudera Kendari,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Syahril Abd. Raup

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Surat Undangan Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari Nomor B.640/PPSK/TU.330/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Undangan.

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
Jam : 14.00 WITA - selesai
Tempat : Ruang Rapat Cakalang
Agenda : Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran TA. 2025
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Selasa tanggal 18 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka pembahasan efisiensi anggaran TA. 2025 yang dipimpin oleh Kepala PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

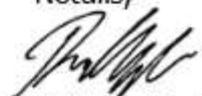
1. Estimasi perhitungan nilai anggaran PPS Kendari setelah efisiensi sebesar 2.273.066.280 dioptimalkan untuk operasional kantor.

PHLN	28,326,000,000
Efisiensi	7,296,292,000
sisa	5,473,572,000
outsourcing satpam	1,232,982,720
PJLP (13 Bulan)	1,053,974,000
TKK (12 Bulan)	813,549,000
internet	100,000,000
Jumlah	3,200,505,720
sisa akhir	2,273,066,280

(estimasi Rp2.273.066.280 belum termasuk perhitungan listrik, bensin, perjalanan dinas, pemeliharaan, honorarium pengelolaan keuangan dan internet pelabuhan binaan)

2. Tim pelayanan usaha dan TKSP agar bersinergi mengatur pemakaian listrik, mengidentifikasi penggunaan listrik di kantor PPS Kendari dan pemakaian internet serta berkoordinasi dengan PLN.
3. Pelayanan terpadu pada hari sabtu beroperasi di kedatangan kapal.
4. Membuat tim Satgas Hemat Listrik yang terdiri dari satpam.
5. Semua kegiatan korespondensi menggunakan sistem elektronik (tidak ada surat yang di print).
6. Menyampaikan pengumuman di control room agar pegawai berkemas pada jam pulang kantor dan menggunakan BMN secara efisien.
7. Menghitung pembayaran BBM dan pajak kendaraan.
8. Setiap bidang agar mempertahankan kinerja tanpa mengurangi target dan mengidentifikasi kegiatan yang mendesak.

Notulis,



Rully Indriani

DOKUMENTASI RAPAT EFISIENSI ANGGARAN





DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
Jam : 11.00 - selesai
Acara/Kegiatan : Rapat Pembahasan Efisiensi Anggaran TA. 2025

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Syahri Abd Raup	Kepala Pelabuhan	
2.	Redy P.	PPK	
3.	M. IKRAM	Kesyabdan	
4.	MUKHTAR	operasional	
5.	Saiful Kurniawan		
6.	Wayan Budiarta		
7.	Budi Santoso	pelayanan usaha	
8.	Purwan. A	Itan	
9.	Nurul Hikmah	Analisis SDMA	
10.	Wd. Husiani		
11.	Purwanto	dukman	
12.	Nurika	dukman	
13.	Rully Hermiani	dukman	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Layanan Pengaduan

PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI
Jl. Samudera No.1 Puday, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, 93233
Telp. (0401) 3190868 Fax. (0401) 3190868 Email : infoposkdj@yahoo.co.id



SCAN ME

NOTULEN RAPAT

A. Dasar:

Instruksi Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari

B. Pelaksanaan:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Februari 2025
Jam : 09.00 WITA - selesai
Tempat : RR. Cakalang
Agenda : Rapat Revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan)
Peserta : Daftar Hadir/Dokumentasi Terlampir

C. Hasil Rapat:

Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Februari 2025 telah dilaksanakan rapat dalam rangka pembahasan Revisi POK lingkup PPS Kendari yang dipimpin oleh Kepala PPS Kendari. Setelah melalui diskusi diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Tim Kerja Tata Kelola Sarana dan Prasarana yang mendesak dan perlu dilaksanakan di TA. 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Pemeliharaan bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) direvisi untuk sedot tinja dan pengadaan kran
 - b. Pemeliharaan Gedung Kantor Permanen direvisi untuk less plang dan tambahan internet
 - c. Biaya pengawasan dipindahkan ke pemeliharaan gedung dan bangunan:

521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomplek	60,277,000	0	0	0	0.00 %	60,277,000
	000272. Pengawasan Pekerjaan Pengecatan Kantor	10,277,000	0	0	0	0.00 %	10,277,000
	000273. Pengawasan Pekerjaan Pembangunan rumah jaga type 36	20,000,000	0	0	0	0.00 %	20,000,000
	000274. Pengawasan Pekerjaan Lanjutan Jalan Kawasan	30,000,000	0	0	0	0.00 %	30,000,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	254,259,000	0	0	0	0.00 %	254,259,000
	000275. Pengecatan Gedung Kantor	101,955,000	0	0	0	0.00 %	101,955,000
	000276. Perkir Kendaraan Berat	22,544,000	0	0	0	0.00 %	22,544,000
	000277. Pemeliharaan toilet masjid	129,760,000	0	0	0	0.00 %	129,760,000

Pemindahan tersebut untuk kegiatan pemeliharaan fasilitas yang meliputi pemeliharaan atap TPI, pemeliharaan unit pengolahan air bersih, pemeliharaan jaringan IPAL, pemeliharaan CCTV, pemeliharaan atap kantin, pemeliharaan rusun, pemeliharaan drainase bengkel genset, pemeliharaan gedung sarana, pemeliharaan jaringan, dan pemeliharaan *sound system*.

2. Pelabuhan Perikanan Untia
Revisi pada Hotel penginapan layanan kesyahbandaran, revisi perjalanan dinas biasa menjadi perjalanan dinas dalam kota.
3. Pelabuhan Perikanan Sebatik
Revisi perjalanan dinas biasa menjadi perjalanan dinas lokal. Belanja pengadaan (53) diblokir pada tahun anggaran 2025.
4. Kegiatan Tim Kerja Operasioanal Pelabuhan yang perlu dilaksanakan meliputi:
 - a. Menginformasikan kepada Humas untuk mem-*publish* Informasi Harga Ikan
 - b. Belanja perjalanan dinas biasa direvisi menjadi supervisi ke pelabuhan binaan.
 - c. Kegiatan PIPP direvisi menjadi kegiatan tahunan WPPNRI 714. Honor ketua dirubah menjadi spanduk. Transport peserta menjadi transport narasumber. Perjalanan

dinas paket meeting luar kota agar digabungkan dengan perjalanan dinas dalam kota.

5. Kegiatan Tim Kerja Pelayanan usaha yang perlu dilaksanakan di tahun anggaran 2025 yaitu pemeliharaan mesin cold storage.
6. Kegiatan Tim Kerja Kesyahbandaran di tahun anggaran 2025 meliputi:
 - a. Pencetakan blanko disesuaikan dengan yang sebelumnya
 - b. Perjalanan dinas pada kegiatan SHTI direvisi menjadi uang layar
 - c. Desiminasi SHTI Buton Selatan direvisi menjadi uang layar dan perbekalan.
 - d. Sosialisasi logbook kegiatan perjalanan dinas direvisi menjadi ATK dan perjalanan lokal
7. Biaya langganan jasa listrik diefisiensikan untuk membayar kekurangan honor PJLP. Efisiensi lampu jalan, dermaga 3, videotron dan TPI higienis jika sudah tidak ada kegiatan. Setelah semua kegiatan selesai dilakukan agar mematikan lampu pada jam 11 malam.
8. Kegiatan Tim Kerja Dukungan Manajerial yang perlu dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Keperluan sehari-hari perkantoran seperti alat pel, sapu dan peralatan yang digunakan agar dijaga dalam kondisi baik.
 - b. Belanja honor operasional satuan kerja terdapat kekurangan Rp35.664.000,-
 - c. Memastikan anggaran untuk Diklat PKN II Rp30.000.00,-
 - d. Belanja Jasa Lainnya (PJLP) kekurangan honor sebesar Rp606.237.000
 - e. Menutup jaringan internet di PPDI, Pos Satpam, Rusunawa dan Taman Edukasi. *Me-reset password* jaringan internet Rusunawa dan CCTV dihubungkan ke control room.
 - f. Menghapus kegiatan penilaian Aset BMN
 - g. Menghapus kegiatan peningkatan kapasitas pegawai, kecuali perjalanan dinas.
 - h. Perhitungan BBM akan dilakukan setelah pembukuan dari Bendahara Pengeluaran.
9. Pembinaan rohani bagi muslim dipindahkan ke Masjid Al-Furqan PPS Kendari, berkolaborasi dengan Pegawai Pecinta Masjid (PPM).

Notulis,



Rully Indriani

DOKUMENTASI RAPAT REVISI POK (PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN)

